

---

## Inovasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Pangeran Sambernyowo di Era Masyarakat 5.0

Muhammad Iqbal Birsyada, Siswanta  
Universitas PGRI Yogyakarta

### Abstract

*Education is essentially and culturally aimed at developing cultural values that become the identity of the character of society and the nation. These essential values can be developed in various ways, such as strengthening the values of national character (nation character building). This article aims to analyze the historical values of Prince Sambernyowo's struggle, which can then be developed into a prototype model of national character education in society in the 5.0 era. This study uses historical methods, including the heuristic process, source criticism, and historical interpretation. The results of this study reveal that the struggle carried out by Prince Sambernyowo was essentially against injustice over the VOC's interference in the Mataram court environment. The educational values that can be developed from this event are courage, unyielding, unity, love for the homeland, and patriotism. In carrying out socializing and internalizing historical learning based on the values of Prince Sambernyowo's struggle in the industrial era 5.0, this can be done by creating digital content such as website, youtube, facebook, tweeter and other social media*

**Keywords:** Education, National Character, Historical Values, Struggle, Prince Sambernyowo, Society 5.0.

### Abstrak

Pendidikan secara esensial dan kultural pada hakikatnya bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi identitas karakter masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai esensial tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai cara seperti penguatan nilai-nilai karakter kebangsaan (*nation character building*). Artikel ini bertujuan menganalisis tentang nilai-nilai sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo yang kemudian dapat dikembangkan menjadi sebuah prototipe model pendidikan karakter bangsa pada masyarakat era 5.0. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang seluruhnya meliputi proses heuristik, kritik sumber dan interpretasi sejarah. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo pada hakekatnya adalah melawan ketidakadilan atas ikut campurnya VOC ke dalam lingkungan keraton Mataram. Nilai-nilai pendidikan yang dapat dikembangkan dari peristiwa ini adalah sikap keberanian, pantang menyerah, persatuan, cinta tanah air dan patriotik. Dalam melakukan proses sosialisasi dan internalisasi pembelajaran sejarah berbasis nilai perjuangan Pangeran Sambernyowo pada era industri 5.0 ini dapat dilakukan melalui pembuatan konten digital seperti website, youtube, facebook, tweeter dan media sosial lainnya.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Karakter Bangsa, Nilai-Nilai Sejarah, Perjuangan, Pangeran Sambernyowo, Masyarakat 5.0.



## Pendahuluan

Secara esensial tujuan pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengembangan kualitas karakter kepribadian seseorang. Hal tersebut karena nilai-nilai pendidikan berkaitan langsung dengan kepentingan moral orang lain (Zuchdi, 2010). Dengan demikian seseorang dapat bertindak secara konsisten terhadap apa-apa yang diyakininya. Selain itu pendidikan juga dapat menjadi alat sosialisasi nilai kepada anak-anak agar mereka benar-benar mampu menghayati peranan sosial yang seharusnya mereka terapkan (M Iqbal Birsyada, 2016). Pada konteks selanjutnya pendidikan menjadi sebuah proses humanisasi. Pada generasi millennial persoalan-persoalan psikologis dan sosial rentan terjadi sebagai efek kondisi kejiwaan yang masih labil. Beberapa persoalan lainnya adalah generasi millennial seringkali merasa mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam pergaulan padahal sebetulnya mereka belum tuntas dengan dunia kekanak-kanakannya sehingga serba tanggung. Mereka rentan dengan kebimbangan menghadapi kenyataan sosial yang ada dihadapannya (Suud, 2008).

Secara teoritis, tujuan pendidikan tidak akan pernah tercapai jika tidak memadukan antara aspek kognitif dan afektif. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk membentuk karakter peserta didik tanpa diikuti dengan praktek kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sebenarnya nilai-nilai karakter dan moral menyatu dengan kualitas pendidikan (Lovata dan Clementa, 2010). Untuk mencapai kualitas pendidikan yang terbaik dibutuhkan kerjasama berbagai pihak terutama anak, orangtua, sekolah dan lingkungan sosial dalam arti luas. Hal lain yang dapat dipahami adalah bahwasanya karakter moral seseorang adalah menentukan sikap dan perilaku sehari-hari untuk berperilaku baik atau buruk (Bandura et al., 2002). Pada konteks anak usia remaja biasanya mereka mengalami apa yang dinamakan dengan "dilema moral." Mereka sulit memutuskan sesuatu berkaitan dengan moral yang mereka yakini. Mereka mengalami tahapan "perkembangan moral" (Althof & Berkowitz\*, 2006). Menurut Lickona (1991) moral seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*, yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Indikator pembentukan karakter atau watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral atau sering disebut *moral knowing*, sikap moral atau *moral feeling*, dan perilaku moral atau sering disebut *moral behavior*.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa persoalan nilai-nilai karakter sosial dan budaya sangat menentukan membentuk karakter lingkungan sosial. Beberapa perilaku saling tolong menolong diantara sesama warga masyarakat dapat meningkatkan hubungan dan kemajuan sosial (Jonas, 2012). Selain itu nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber pada budaya lokal juga perlu dikembangkan untuk penguatan pendidikan nilai khususnya pada masyarakat dan peserta didik (Muhammad Iqbal Birsyada et al., 2016; Muhammad Iqbal Birsyada & Permana, 2020).

Beberapa studi tentang peranan pendidikan nilai berbasis kearifan lokal dilakukan

oleh berbagai pihak salah satunya kajian Setianto (2010) melihat pendidikan budaya keraton Jawa yang feodal dan aristokratis sampai saat ini masih mendominasi dalam struktur pemerintahan di Indonesia terlebih di Jawa walaupun sedikit banyak telah banyak bercampur dengan konsep modern dan kepemimpinan rasional.

Studi tentang pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya Jawa juga telah dilakukan oleh Amini (2016) yang khusus meneliti secara spesifik nilai dan budaya priyayi keluarga keraton Yogyakarta pada tahun 1921-1939. Hasil temuan menunjukkan bahwasanya pola pendidikan karakter di dalam lingkungan keraton mengalami pergeseran khususnya pada pola asuh anak-anak keluarga kerajaan. Pola asuh yang semula ditradisikan dipegang oleh *mbok emban* sebagai abdi dalem raja yang bertugas mendidik anak-anak keluarga raja ketika masih balita hingga beranjak remaja kemudian digantikan dengan pola pendidikan model eropa sebagaimana yang diterapkan oleh keluarga orang-orang Belanda. Dampak dari pergeseran pola asuh tersebut adalah sedikit lunturnya budaya Jawa pada anak-anak keluarga kerajaan karena terpengaruh nilai-nilai budaya eropa. Hasil studi Amini (2016) tentang pergeseran nilai-nilai pendidikan pola asuh para keluarga keraton Yogyakarta pada tahun 1921-1939 agaknya senada dengan hasil kajian Suharso et al. (2017) tentang kehidupan kelas menengah priyayi di Yogyakarta pada era modern. Kajian ini menemukan bahwasanya kehidupan kelas menengah di Yogyakarta pada saat ini lebih mencerminkan mengarah pada gaya hidup masyarakat modern daripada gaya hidup yang mencerminkan pola-pola budaya lama Jawa. Keterbukaan priyayi kelas menengah di Yogyakarta terhadap budaya modern menyebabkan pergeseran budaya dari nilai-nilai hidup priyayi lama seperti *mesu budi* menjadi bergaya hidup modern menyesuaikan perkembangan zaman dan cenderung mengikuti arus trend global.

Berbeda dari studi Amini (2016) dan Suharso et al. (2017). Studi Gularso et al. (2019) yang mengkaji tentang internalisasi pendidikan *Kawruh Pamomong* dari Ki Ageng Suryomentaram di Dusun Balong Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran pendidikan moral *Kawruh Pamomong* berhasil diinternalisasikan oleh orangtua kepada anak-anaknya secara baik. Salah satu pokok ajarannya adalah masalah kebenaran dan keindahan. Selain hasil studi Gularso et al. (2019) kajian senada juga dilakukan oleh (Permana, 2020) yang mengkaji pendidikan karakter dari Mbah Marijan penjaga gunung Merapi Yogyakarta. Salah satu temuannya adalah petuah merapi menjadi pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai kesiapsiagaan bencana erupsi gunung Merapi.

Jika pada penjelasan-penjelasan di atas dipaparkan pola pengembangan nilai-nilai budaya lokal khususnya pada masyarakat Jawa, maka beberapa studi lain tentang pola pengembangan pendidikan nilai karakter bangsa juga mendapat perhatian khususnya dalam kajian pendidikan di sekolah. Studi Sariyatun (2013) yang mengkaji pengembangan model pendidikan nilai dan karakter budaya khususnya pada seni batik klasik di

Surakarta. Sedangkan Sutomo (2014) dan Musadad (2015) mengkaji implementasi pendidikan akhlak di sekolah khususnya dalam rangka menghadapi konten dan tantangan global. Studi terakhir mengenai karakter pendidikan nilai berbasis perjuangan adalah kajian (Muhammad Iqbal Birsyada et al., 2016) yang mengkaji nilai-nilai perjuangan Mangkunegara IV. Hasil temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan di praja Mangkunegaran sangat terkait dengan falsafah hidup pendiri kerajaan. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk pengembangan karakter budaya Jawa dan penguatan ekonomi praja Mangkunegaran. Berdasarkan hasil dari kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih perlu dikembangkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kekinian. Selain itu bagaimana proses sosialisasi nilai-nilai karakter tersebut dapat langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada fokus tokoh yang menjadi acuan model pendidikan berbasis kearifan lokal yaitu Pangeran Sambernyowo atau dikenal dengan Raden Mas Said yang merupakan salah satu priyayi keraton trah Mataram memiliki karakter perjuangan dan keberanian dalam melawan penjajah. Kedua penelitian ini memberikan luaran konseptual tentang bagaimana mengembangkan karakter pendidikan berbasis nilai perjuangan Pangeran Sambernyowo ke dalam bentuk konten-konten digital.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang seluruhnya melalui prosedur sejarah diantaranya heuristik, kritik sumber dan interpretasi sejarah (Wasino, 2008). Pendekatan sejarah digunakan untuk merekonstruksi nilai-nilai sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo dalam melawan penjajah selain itu juga menjelaskan pendidikan karakter yang diajarkannya melalui sikap dan pandangan hidup. Secara material, sebagian besar sumber-sumber dalam artikel ini didapatkan dari Perpustakaan Reksa Pustaka Istana Mangkunegaran dan sumber-sumber lain yang relevan. Selain dari data-data primer juga dibandingkan secara kritis dengan data sekunder seperti hasil penelitian dari jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional. Literatur yang digunakan bertemakan sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo seperti: *Babad Mangkunegaran*, *Babad Lelampahan*, *Babad Memengsahan* serta literatur-literatur lain yang senada mengungkap pemikiran dan perjuangan Pangeran Sambernyowo yang akan dianalisis dengan teori pendidikan karakter. Studi literatur mengenai sejarah perjuangan pangeran Sambernyowo tersebut untuk melihat hubungan antara sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo dengan pendidikan karakter yang telah dipraktekkan kepada seluruh keluarga dan penduduk praja Mangkunegaran. Dengan keseluruhan tahapan metodologi ini diharapkan dapat menghubungkan antar fakta yang dihasilkan mengenai studi sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo dengan pengembangan pendidikan nilai-nilai karakter kebangsaan.

## Hasil dan Pembahasan

Pada konteks lingkup masyarakat Jawa lama paling tidak ada beberapa tingkatan hierarki sosial yang telah ditetapkan. Pertama adalah kelas aristokrat yaitu dihuni oleh raja beserta keluarga dan kerabatnya sering disebut *ndoro* atau *priyayi ageng* memiliki nasab darah biru atau bangsawan dan dapat dilihat dari perilaku pakaian dan tata krama yang halus lagi terstruktur rapi (Soeratman, 1989). Selain terkesan halus para priyayi ini juga mendapatkan segenap pendidikan etika budaya Jawa termasuk sastra dan seni (Kartodirdjo et al., 1987). Untuk priyayi yang bukan dari keturunan raja namun berupa abdi dalem maka ia harus menunjukkan dedikasinya terlebih dahulu melayani keluarga kerajaan bertahun-tahun sampai benar-benar raja berkenan untuk menaikkan pangkat kepriyayian nya. Pangkat atau gelar ini sebagai penanda level tingkat kepriyayian nya. Untuk mencapai tahap demi tahap maka seorang abdi dalem yang ingin menjadi priyayi maka ia harus magang dalam jangka waktu yang lama (Birsyada, Muhammad Iqbal. Wasino, Suyahmo, 2017). Salah satu tugas utamanya adalah menjaga ketertiban dan ketentraman kerajaan (Houben, Vincent, 2017). Di bawah kelas priyayi adalah kelas pedagang dan wong cilik. Keduanya adalah yang mendapatkan perintah dari priyayi. Kelompok *wong dagang*, *wong tani*, buruh nelayan masuk dalam kelas *wong cilik* keduanya saling terikat. Walaupun demikian tanpa dukungan dari kelas *wong cilik* posisi seseorang di kerajaan tidak akan bertahan lama. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dukungan masyarakat kelas bawah menentukan posisi seorang priyayi.

Pada era pra kemerdekaan para priyayi ini mendapatkan tanah lungguh dari kerajaan dan dapat diwariskan ke anak-anaknya. Tanah-tanah lungguh tersebut biasanya tidak digunakan langsung melainkan disewakan ke pihak swasta asing (Wasino, 2014). Selain bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman kerajaan priyayi juga menjadi pen jembatan antara kerajaan dan rakyatnya (Suharso et al., 2017). Namun pada prakteknya selain biasanya tanah-tanah lungguh atau *apanage* yang diberikan kepada para priyayi tersebut disewakan kepada orang-orang Cina atau Eropa juga pihak pemilik mendapatkan uang ganti sewa (M Iqbal Birsyada, 2016; Wasino, 2008). Karena posisinya yang tinggi dalam struktur budaya Jawa, kedudukan sebagai priyayi ditentukan sejauh mana kedekatannya dengan keluarga kerajaan. Dengan cara mendekat keluarga kerajaan maka tidak lama lagi akan mendapatkan tempat sebagai bagian dari penguasa di wilayah Jawa. Pada pasca Sultan Agung, di kerajaan Mataram mulai timbul benih-benih perpecahan politik dan kekuasaan di kalangan keluarga dan kerabatnya sendiri untuk menjadi pucuk pimpinan yaitu raja. Masuknya VOC ke dalam pemerintahan Mataram semakin memperkeruh suasana sosial dan politik istana (Burdah, 2017). Bukti dari itu adalah sepanjang wilayah pesisir utara Jawa berhimpun menjadi oposisi Mataram (De Graaf, 1987; Moertono, 2018). Selain berasal dari kerabat Mataram perlawanan juga didukung oleh kelompok kalangan santri. Terhadap penetrasi kekuatan VOC ke dalam tubuh pemerintahan Mataram inilah terjadi perlawanan dari lingkungan kalangan priyayi Mataram secara kolektif untuk

merubah posisi serba terjepit tersebut. Posisi priyayi Mataram yang ingin merubah kondisi dan nasib masyarakat tersebut dalam perspektif sosial merupakan sebuah upaya tindakan kolektif untuk merubah suatu tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan tersebut berusaha keras untuk melakukan perubahan sosial mendasar secara terstruktur dan rasional (Greene, 2002).

Pada awal abad ke-18 Mataram terbagi menjadi dua kutub kekuatan politik yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang ditandai dengan perjanjian Giyanti 1755. Pada situasi seperti itu posisi Belanda selalu saja ingin menyeimbangkan kedua kutub kekuatan ini dan bagaimanapun juga harus bisa dikendalikan (Muhammad Iqbal Birsyada et al., 2016). Pada tahun 1757 Mataram terpecah lagi dengan berdirinya praja Mangkunegaran melalui perjanjian Salatiga (Wasino, 2014). Dengan berdirinya praja Mangkunegaran maka praja Kejawen pada saat itu memiliki tiga kekuatan politik yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Menurut Rinkes (1924) Mangkunegaran sangat berbeda dengan praja Kejawen lainnya khususnya dalam hal pola kebudayaannya. Mangkunegaran lebih memilih gaya pemerintahan modern ketimbang gaya tradisional. Salah satu yang dimodernisasi adalah dalam hal pembangunan ekonominya (Wasino et al., 2019). Perpecahan politik dan kekuasaan yang terjadi di tubuh Mataram tersebut secara sosial sebenarnya didorong oleh penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki semangat solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan elite penguasa, pihak lawan dan pihak-pihak yang berwenang. Biasanya perlawanan-perlawanan dilakukan dengan menentang kekuasaan absolut, wewenang dan kultur yang telah mapan (Puryanto, Sidik dan Susanto, 2019; Stolley, 2005).

Perbedaan lainnya antara Mangkunegaran dengan Kasunanan dan Kasultanan adalah dalam hal militer. Mangkunegaran memiliki korps militer modern dengan persenjataan lengkap yang tidak kalah dengan pasukan-pasukan Belanda yang terlatih yang kemudian dinamakan dengan *Legiun Mangkunegaran* (Birsyada, Muhammad Iqbal. Wasino, Suyahmo, 2017). Walaupun demikian menurut Rinkes (1924) Mangkunegaran tidak pernah meninggalkan warisan nilai-nilai budaya Jawa yang telah dipraktikkan oleh pendiri praja. Berbagai kesenian Jawa masih sering dipentaskan sampai saat ini di Pura Mangkunegaran. Selain itu Mangkunegaran juga memiliki korps *prajurit estri* yang kekuatan tempurnya juga tidak kalah dengan pasukan laki-laki Mangkunegaran (Carey & Houben, 2016). Melihat kekuatan tempur militer yang demikian kokohnya menjadikan Mangkunegaran di atas praja Kejawen lainnya seperti Kasunanan dan Kasultanan.

Sepeninggalannya Sultan Agung Mataram banyak terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan (Moertono, 2018). Hal tersebut terjadi tidak lain karena pola kepemimpinan Mataram pasca Sultan Agung dianggap amat lemah dibuktikan mudah didikte oleh VOC (Pamberton, 2003; M. Ricklefs, 1974). VOC berusaha mengendalikan kutub-kutub kekuatan Mataram (Joebagio, 2017). Para kelompok aristokrat Jawa berusaha

untuk menjaga ketertiban dan mendamaikan keadaan namun selalu gagal (Houben, Vincent, 2017). Pangeran Sambernyowo yang lahir dari trah Mataram mencoba memformulasikan perjuangan untuk melawan Belanda. Strategi-strateginya menjadikan Pangeran Sambernyowo juga harus berhadap-hadapan dengan keluarga dan kerabatnya sendiri seperti Pakubuwana II dan Mangkubumi (Fananie, 2005). Pasca peristiwa Geger Pecinan dan pindahnya keraton Kartasura ke Surakarta menjadikan titik balik Pangeran Sambernyowo untuk terus berjuang melawan Belanda bersama kerabat-kerabat lainnya (Wasino, 2015). Konflik demi konflik yang terjadi di Mataram pada intinya adalah karena lemahnya kepemimpinan Sunan Pakubuwana terhadap penetrasi Belanda sehingga diantara keluarganya bergabung untuk melawannya (M. C. Ricklefs, 2007). Sunan dianggap sudah tidak lagi independen (Wasino, 2014). Munculnya Pangeran Sambernyowo atau sering disebut Raden Mas Said ke gelanggang percaturan kekuatan politik diantara trah malam merupakan kekuatan baru yang amat diperhitungkan oleh Belanda (Kumar, 1980).

Apabila dilihat dari kekuatannya, Pangeran Sambernyowo tidak berdiri sendiri dalam berjuang melawan Belanda. Ada dua kekuatan lainnya yang ikut bergabung diantaranya adalah kekuatan pasukan dari Raden Mas Garendi dan Mangkubumi (Wasino, 2015). Pasukan Pangeran Sambernyowo hampir tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Jumlah pasukannya memang kecil namun memiliki keterampilan profesional seperti menggunakan senapan, pedang dan memanah (Kamajaya, 1993). Ia selalu berusaha menghindari pertempuran secara berhadap-hadapan karena jumlah pasukan yang sedikit (Sudarmojo, 2011). Walaupun demikian strategi gerilya yang dipakai sangat mematikan lawan-lawannya. Pada tahun 1743 Pangeran Sambernyowo bergabung dengan pasukan Raden Mas Garendi melawan Belanda dan pasukan Pakubuwono II (M. Ricklefs, 1974). Pada selanjutnya pasukan keduanya bergabung dengan pasukan Mangkubumi. Bergabungnya dua kekuatan besar yaitu antara pasukan pimpinan Pangeran Sambernyowo dan Mangkubumi ini mendapat simpati yang amat besar dari masyarakat Jawa sehingga kekuatannya dapat mengimbangi pasukan gabungan Belanda dengan Sunan (Kumar, 1980). Pada masa ini juga Pangeran Sambernyowo dinikahkan dengan putri Mangkubumi Ratu Bandara. Pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Mas Said dan Mangkubumi yang membuat mereka akhirnya berpisah dan berakhir pada perjanjian Giyanti di desa Jatisari Sokawati 13 Februari 1755 yang diprakarsai oleh Gubernur Nicolaas Hartingh (Carey & Houben, 2016). Pada waktu menyusun pasukan di Giyanti Sukowati, Pangeran Sambernyowo bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ngayudo Lelono Joyodiseso Prawiro Hadiningrat (Babad Panambangan, 1981). Terhadap hasil perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyowo menolak keras dan tetap mengobarkan perlawanan melawan Belanda (Wasino, 2015). Perang berakhir ketika perjanjian Salatiga 1757 dengan disahkannya praja Mangkunegaran

sebagai kerajaan baru dengan raja bergelar KGPAA. Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyowo (Houben, 1994; Lombard, 2005; Wasino, 2014).

Pada era digital saat ini posisi sejarawan dan guru-guru sejarah serba dilematis. Persoalan yang utama adalah sistem kurikulum di Indonesia yang selalu berubah-ubah di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang pesat dan sebagian dari guru-guru sejarah angkatan lama tidak bisa mengikuti dengan baik. Materi-materi sejarah yang seharusnya dijelaskan secara (causalitas, cronology, continuity, comprehensive) ternyata tidak mudah dibayangkan jika harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi era digital saat ini. Disini lainnya pandangan masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwasanya pendidikan sejarah di sekolah adalah penuh dengan hafalan dan diajarkan monoton. Selain itu keengganan guru-guru sejarah dalam memaparkan pembelajaran sejarah yang mengandung kontroversial masih sangat minim sehingga masih memerlukan metode yang komprehensif untuk mengurangi indoktrinasi dalam pemahaman sejarah di kelas (Hartono & Huda, 2020). Dengan demikian pembelajaran sejarah saat ini kurang menjadikan anak didik menjadi lebih kreatif dan menyenangkan sekaligus kritis (M Iqbal Birsyada, 2016; Suud, 2008). Selain itu proses pembelajaran selama ini masih banyak yang berorientasi pada *teacher centered* walau banyak juga guru di sekolah yang sudah mempergunakan basic pembelajaran berbasis pada peserta didik atau sering disebut dengan *student centered*.

Bahkan dari hasil temuan di beberapa kasus di beberapa SMA masih banyak guru sejarah enggan mengajarkan sejarah atau materi-materi sejarah yang bermuatan kontroversial sebab dianggap membuang-buang waktu karena tidak dituntut dalam SK/KD kurikulum sejarah mereka. Akibatnya daya kritis siswa dalam pembelajaran sejarah lemah (Ahmad, 2010; Suud, 2008). Padahal dasar tujuan dari mempelajari sejarah tidak lain adalah agar peserta didik dapat menentukan pilihan dan mempertimbangkan berbagai pendapat untuk membawakan berbagai kisah yang mereka bawakan sendiri secara kritis (Wineburg, 2006). Dengan kita mempelajari sejarah maka dapat mempersatukan masyarakat akan kesadaran jati diri pribadinya. Bagi siswa, dengan belajar sejarah dapat menimbulkan rendah hati, budi pekerti, patriotisme. Masa lalu dapat dipergunakan oleh guru untuk meneropong lebih jauh membuka didalam kulit-kulit sejarah yang mendalam. Sehingga pembelajaran sejarah dapat bermakna bagi siswa. karena mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Kasmadi, 2005).

Secara praksis dapat dijelaskan bahwasanya puncak kepuasan dari para sejarawan adalah ketika proses penelitian, interpretasi dan penulisannya telah dikerjakan dengan tambahan mengandalkan daya imajinasi dan kreativitasnya. Sumber-sumber primer dan sekunder telah ditemukannya sebagai argumen. Dengan membaca berbagai karya-karya sejarah secara kritis maka interpretasi dan penafsiran sejarah dapat berubah sewaktu-

waktu. Oleh karena itu dalam penulisan sejarah perlu pentingnya apa yang dinamakan dengan *drafting, proofreading, peer reviewing*, mengedit / merevisi, menyajikan secara lisan, dan akhirnya menghasilkan esai tertulis Galgano et al. (2012). Sejarah akan tetap menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan Universitas selama manusia masih hidup dan menuliskannya. Dengan proses digitalisasi membuat siswa semakin tertarik belajar sejarah dan mau menghabiskan waktunya seharian dengan sejarah. Apalagi jumlah sumber digital semakin meningkat pesat. Selain itu konten-konten di Youtube semakin digemari anak-anak generasi millennial. Pada Oktober 2012 Facebook mengumumkan bahwa situs mereka telah melampaui satu miliar anggota. Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia digital maka pembelajaran sejarah akan semakin kreatif dan mengedepankan imajinasi siswa sehingga mereka selain bekerja juga dapat bermain melalui konten-konten media sosial yang mereka miliki (Kellys, Mills, 2013). Mereka bisa mengembangkan konten-konten materi sejarah ke dalam perangkat lunak komputer maupun media sosial mereka. Nilai-nilai dalam sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo dapat disosialisasikan juga lewat media-media digital sebagai salah satu pengembangan inovasi pembelajaran sejarah di kelas.

## Simpulan

Perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo pada hakekatnya adalah melawan ketidakadilan atas ikut campurnya VOC ke dalam lingkungan kraton Mataram. Pangeran Sambernyowo menginginkan Mataram selayaknya menjadi kerajaan yang independen berdaulat atas wilayah kekuasaannya memiliki kebijakan mandiri tanpa didikte oleh VOC. Penetrasi VOC yang semakin ke dalam ketubuh Mataram menjadikan kerajaan ini dalam kondisi konflik berkepanjangan. Sejak meninggalnya Sultan Agung Mataram tidak lagi memiliki pemimpin yang cakap dan pemberani untuk melawan penjajah di wilayah kekuasaannya. Perjanjian Giyanti 1755 semakin memperkeruh posisi kedaulatan Mataram (M. Ricklefs, 1974). Di sisi lain Pangeran Sambernyowo tetap memilih berjuang untuk melawan Belanda habis-habisan sampai pada perjanjian Salatiga 1757 berdirinya praja Mangkunegaran sebagai awal cikal bakal kelahiran kerajaan Mangkunegaran yang independen. Pangeran Sambernyowo naik tahta menjadi raja Mangkunegaran dengan gelar KGPAA. Sri Mangkunegara I. Nilai-nilai pendidikan yang dapat dikembangkan dari peristiwa ini adalah sikap keberanian, pantang menyerah, persatuan, cinta tanah air dan patriotik. Dalam proses sosialisasi dan internalisasi pembelajaran sejarah berbasis perjuangan Pangeran Sambernyowo pada era industry 5.0 ini dapat dilakukan melalui konten-konten digital seperti website, youtube, facebook, tweeter dan media sosial lainnya. Guru sejarah dan siswa dapat bekerja membuat konten-konten sejarah perjuangan Pangeran Sambernyowo secara kreatif dan menyenangkan. Dengan demikian rapannya materi sejarah yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik semakin digemari oleh anak-anak millennial (Kellys, Mills, 2013).

## Acknowledgment

Ucapan terimakasih kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas pendanaan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kepada Perpustakaan Reksa Pustaka Istana Mangkunegaran yang telah banyak membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah terkait penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, T. A. (2010). *Implementasi critical pedagogy dalam pembelajaran sejarah kontroversial di SMA Negeri Kota Semarang*. UNS (Sebelas Maret University).
- Althof, W., & Berkowitz\*, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495–518.
- Amini, M. (2016). Anomali Pola Asuh: Keraton Yogyakarta, 1921-1939. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 166–172.
- Bandura, A., Underwood, B., & Fromson, M. E. (2002). Disinhibition of aggression through diffusion of responsibility and dehumanization of victims. *Journal of Research in Personality*, 9(4), 253–269.
- Birsyada, Muhammad Iqbal. Wasino, Suyahmo, H. J. (2017). The Business Ethics of Royal Family: Mangkunegara IV, Sufism and Economy in Java." *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(7).
- Birsyada, M Iqbal. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan IPS: Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ombak.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, & Permana, S. A. (2020). The Business Ethics of Kotagede's Silver Entrepreneurs from the Kingdom to the Modern Era. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(2), 145–156.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, Wasino, W., Suyahmo, S., & Joebagio, H. (2016). Pemikiran kewirausahaan keluarga Mangkunegaran. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 174–185.
- Burdah, I. (2017). THE POLITICS OF MATARAM KINGDOM DURING THE REIGN OF SULTAN AGUNG. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 267–306.
- Carey, P. B. R., & Houben, V. J. H. (2016). *Perempuan-perempuan Perkasa: di Jawa Abad XVIII-XIX*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- De Graaf, H. . (1987). *Runtuhnya Istana Mataram*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Fanie, Z. (2005). *Restrukturisasi Budaya Jawa Perspektif KGPAA MN I*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Galgano, M. J., Arndt, J. C., & Hyser, R. M. (2012). *Doing history: Research and writing in the digital age*. Cengage Learning.
- Greene, S. (2002). *Sociology and You*. McGraw-Hill.
- Gularso, D., Sugito, S., & Zamroni, Z. (2019). Kawruh pamomong: children education based on local wisdom in Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*,

- 38(2), 343–355.
- Hartono, Y., & Huda, K. (2020). Transformative Learning for Controversial History of G 30 S/PKI. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(2), 135–144.
- Houben, Vincent, J. H. (2017). *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta Yogyakarta: 1830-1870. Cetakan kedua. Mata Bangsa.*
- Houben, V. J. H. (1994). *Kraton and Kumpeni Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870.* KITLV Press.
- Joebagio, H. (2017). Elite Tradisional Dalam Pergumulan Sistem Religio Political Power. *Paramita*, 2(22).
- Jonas, M. E. (2012). Gratitude, resentment, and citizenship education. *Studies in Philosophy and Education*, 31(1), 29–46.
- Kartodirdjo, S., Sudewa, A., & Hatmosuprobo, S. (1987). *Perkembangan peradaban priyayi.* Gadjah Mada University Press.
- Kasmadi, H. (2005). *Teknologi Pembelajaran Dan Pengelolaan Sumber Belajar Untuk Sekolah.* Semarang: UPT UNNES PRESS.
- Kellys, Mills, T. (2013). *Teaching History in the Digital Age.* Digitalculturebooks, an imprint of the University of Michigan Press, is dedicated to publishing work in new media studies and the emerging field of digital humanities.. E-book, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Kumar, A. (1980). Javanese court society and politics in the late eighteenth century: The record of a lady soldier. Part I: The religious, social, and economic life of the court. *Indonesia*, 29, 1–46.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character.* Bantam.
- Lombard, D. (2005). Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II: Jaringan Asia. In *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Moertono, S. (2018). *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX.* Kepustakaan Populer Gramedia.
- Musadad, A. A. (2015). Model Manajemen Pembelajaran Sejarah Terintegrasi Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Wawasan Kebangsaan. *Paramita Historical Studies Journal*, 02(2), 247–260.
- Pamberton, J. (2003). *Jawa: On The Subject of Java.* 2003. Mata Bangsa.
- Permana, S. A. (2020). The Lesson of Mbah Maridjan: The Locksmith of Merapi Mountain to Face the Threat of Eruption. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(10).
- Puryanto, Sidik dan Susanto, D. (2019). *Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang.* Ombak.
- Ricklefs, M. (1974). *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1772, a History of The Division of Java.* Gadjahmada University.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. III.* Serambi.
- Rinkes. (1924). *De Mangkunegaran door.*
- Setianto, Y. (2010). Birokrasi Tradisional di Jawa dalam Perspektif Sejarah.

- Paramita: Historical Studies Journal*, 20(2).
- Soeratman, D. (1989). *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839*. 1989. Taman Siswa.
- Stolley, K. S. (2005). *The basics of sociology*. Greenwood Publishing Group.
- Sudarmojo, A. H. (2011). *Kepahlawanan dan Inspirasi Pangeran Sambernyowo*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Suharso, P., Wasino, W., Prajanti, S. D. W., & Wahyono, S. B. (2017). Middle Class Priyayi: Dillema in the Crossroad of Cultural Changes (Case Study of Lifestyle Changes Midle Class of Priyayi in Yogyakarta). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(7).
- Sutomo, I. (2014). Modification of Character Education Into Akhlaq Education For The Global Community Life. *Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies*, 4(2), 291-316.
- Suud, A. (2008). *Revitalisasi Pendidikan IPS*. Semarang: Unnes Press.
- Wasino. (2008). *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. LkiS.
- Wasino. (2014). *Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa Mangkunegaran 1896-1944*. Kompas.
- Wasino. (2015). Modernisasi Budaya Politik Mangkunegaran. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2, 257-263.
- Wasino, Hartatik, E. S., & Nawiyanto. (2019). From royal family-based ownership to state business management: Mangkunegara's sugar industry in Java from the middle of the 19th to early 20th century. *Management & Organizational History*, 14(2), 167-183.
- Wineburg, S. (2006). *Historical Thinking and other Unnatural Acts Charting the Future of Teaching the Past*. Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan Yayasan Obor Indonesia.
- Zuchdi, D. (2010). *Humanisasi pendidikan: menemukan kembali pendidikan yang manusiawi*.